

Pengembangan Pendidikan Berbasis Daerah

**Eddy Subandrijo
Dwi Nugroho Hidayanto**

Abstract: Implementing the autonomy in both provinces and districts will have significant implication to education system. In one hand, it is an opportunity for empowering human resources in provinces and districts independently. On the other hand, it is districts' challenges, because the provinces and districts must be facilitated with lots of factors, mainly human resources factor with its high competencies. These human resources must be developed prior being used as agents of changes in their own districts. The concept of the District Based Education (DBE) is a break-through for accelerating human resources development in each district.

Kata kunci: otonomi daerah, sumber daya manusia, pengembangan pendidikan, kurikulum.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi yang cukup besar bagi pembangunan daerah di masa depan. Setiap daerah perlu mengubah paradigma pembangunan dari orientasi pusat menjadi orientasi daerah. Kekayaan daerah yang pada mulanya sebagian besar disetorkan ke pusat akan menjadi sebaliknya dengan berlakunya dua undang-undang itu.

Tampaknya kehadiran dua undang-undang ini memberi harapan yang cukup menggembirakan masyarakat daerah, meskipun di satu sisi mela-

Eddy Subandrijo dan Dwi Nugroho Hidayanto adalah dosen di Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda.

hentikan kecemasan baru. Sebagaimana kekhawatiran Tilaar (2000), ada kemungkinan pemberlakuan dua undang-undang ini akan memindahkan *borok* pusat ke daerah. Akan tetapi adalah suatu kewajiban jika produk kebijakan baru pemerintah yang berdampak cukup besar bagi masyarakat akan melahirkan pro dan kontra, harapan dan kecemasan.

Oleh karena implementasi dua undang-undang tersebut tidak mungkin ditolak, yang terpenting adalah mengkondisikan daerah agar siap menerima kenyataan ini dengan berbagai risiko. Tidak ada cara yang lebih baik bagi pengkondisian daerah agar siap menerima beban tugas yang lebih besar, kecuali dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan merupakan strategi yang dipandang efektif untuk membentuk SDM tangguh yang siap membangun daerah.

OTONOMI DAERAH DAN PROSPEK LEMBAGA PENDIDIKAN

Tilaar (2000:103) menyebutkan, ada empat pemain inti dalam proses pemberdayaan masyarakat di daerah, yaitu masyarakat lokal, universitas di daerah, lembaga pemerintah di daerah, dan lembaga pendidikan. Empat pemain inti ini diharapkan dapat berkolaborasi melahirkan putra-putra daerah yang siap dan mampu membangun daerahnya. Adanya asumsi sekolah sebagai pusat keunggulan dan pusat perubahan menjadikan lembaga ini menanggung beban paling berat. Beban yang sama juga dialami oleh universitas, karena universitas merupakan salah satu bagian atau jenjang lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan ini, sesuai dengan fungsinya, berkewajiban menyiapkan SDM yang tangguh untuk membangun daerah. Oleh karenanya, lembaga ini harus mengakomodasi berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun daerah. Kesadaran tinggi lembaga pendidikan untuk menyiapkan SDM tangguh secara serius mengundang simpati Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mulai memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap keberadaan lembaga pendidikan. Bagaimanapun hubungan antara lembaga pendidikan dengan SDM bagaikan sekeping mata uang. Seperti dikatakan oleh Tilaar (2000:55), proses pendidikan adalah pemberdayaan SDM, dan ketika proses pemberdayaan menunjukkan hasilnya, di situlah terlihat kualitas lembaga pendidikan.

Berdasar wacana yang berkembang saat ini, secara teoretik lembaga-lembaga pendidikan di daerah memiliki prospek yang cukup cerah. Penye-

diaan SDM bermutu sebagai pelaku pembangunan daerah merupakan keniscayaan yang telah menjadi kesadaran umum. Hubungan antara SDM bermutu dengan proses pembangunan juga tidak sulit untuk diteorikan. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga pendidikan di daerah telah mempersiapkan diri agar dapat menghasilkan SDM dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan daerah, lembaga-lembaga pendidikan perlu melakukan *restrukturisasi*, *rekulturisasi*, dan *refigurisasi*. Tiga hal ini merupakan faktor penentu keunggulan lembaga-lembaga pendidikan. Kesanggupan menerjemahkan dan mengimplementasikan tiga faktor tersebut secara kreatif dan serasi menjadi jaminan sustainability lembaga-lembaga pendidikan di daerah.

Restrukturisasi perlu dilakukan oleh semua lembaga pendidikan. Restrukturisasi ini terutama berkenaan dengan manajemen dan kurikulum. Struktur manajemen sekolah yang pada mulanya menggunakan pendekatan *top-down* harus siap mengubah diri menuju pendekatan *bottom-up* dengan segala konsekuensinya. Pendekatan *top-down* yang dulu digunakan telah menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang bergantung pada keputusan birokrasi sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk memajukan lembaganya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan lain, yakni pendekatan *bottom-up* yang kemudian oleh Ditjen Dikdasmen (2000) dipopulerkan sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Jiwa MPMBS sama dengan model manajemen yang diungkap Mantja (2000:93), yaitu suatu model yang bermaksud mengurangi campur tangan birokrasi yang dianggap mengganggu proses peningkatan mutu pendidikan dan kemandirian sekolah. Melalui restrukturisasi bidang manajemen, sekolah diharapkan lebih mandiri dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan, mampu memanfaatkan potensi secara optimal, dan memiliki peluang lebih besar untuk memberdayakan SDM (Wijandi & Hidayanto, 2000).

Restrukturisasi kurikulum juga diperlukan agar materi pembelajaran relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Menurut Longstreet dan Shane (1993:63) ada empat jenis kurikulum dilihat dari tujuannya yaitu kurikulum berorientasi masyarakat, kurikulum berorientasi anak-didik, kurikulum berorientasi pengetahuan, dan kurikulum eklektik. Pada kurikulum yang berorientasi masyarakat, struktur materi pembelajaran ditekankan pada apa yang diperlukan oleh masyarakat. Pada kurikulum yang menempatkan

siswa sebagai pusat, pengorganisasian materi pembelajaran didasarkan pada apa yang diperlukan oleh siswa. Pada kurikulum yang berpusat pada ilmu pengetahuan, struktur isi pembelajaran terdiri dari sejumlah bidang ilmu sebagai kajian utama. Pada kurikulum eklektik, struktur isi pelajaran merupakan hasil dari pemilihan terhadap prinsip-prinsip atau doktrin yang beragam.

Dari empat jenis kurikulum tersebut di atas, kurikulum yang berorientasi masyarakat tampaknya paling sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan saat ini. Kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum ini sejalan dengan konsep *Community Based Education* (Tilaar, 2000:13), yang merupakan perwujudan nyata desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan ini berimplikasikan perlunya penyusunan dan penetapan kurikulum diarahkan pada pemberdayaan dan pemanfaatan sumber yang ada di daerah, baik sumber daya manusia mau pun sumber daya alam.

Meskipun struktur kurikulum pendidikan lebih menekankan kebutuhan masyarakat, tidak berarti bahwa empat jenis kurikulum yang lainnya diabaikan. Sebagai kajian, jenis-jenis kurikulum dapat terpisah satu dari yang lain, tetapi pada tingkat implementasi tidak satu pun jenis kurikulum yang dapat benar-benar terasing dari jenis yang lain. Satu dan lainnya saling komplementer dengan komposisi dan proporsi tertentu, karena makna kurikulum (Miller & Seller, 1985:3) adalah serangkaian tujuan dari interaksi langsung atau tidak langsung yang dirancang untuk memfasilitasi belajar dan perkembangan, serta untuk meningkatkan makna pengalaman. Oleh karena itu, para perancang kurikulum di daerah harus bijak dalam melaksanakan tugas pengembangan kurikulum. Pada tingkat kelas, guru perlu arif karena sejak Kurikulum 1994 diberlakukan, guru ditempatkan sebagai pengembang kurikulum di kelas dengan kewenangan yang cukup luas. Melalui keyakinan profesionalnya, guru dan pengembang kurikulum di daerah tidak perlu ragu untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan bahan-bahan belajar berdasarkan potensi lingkungan sekitar. Pada saatnya nanti, guru dan pengembang kurikulum di daerah akan menjadi kunci dalam menentukan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Rekulturasasi memiliki makna perlunya pembaharuan dalam proses kebudayaan yang diarahkan pada berkembangnya kepribadian, kemandirian dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Kemandirian dan

kemampuan untuk bekerjasama merupakan sebagian dari prinsip-prinsip yang mendasari Masyarakat Belajar Abad 21 yang mendapat penegasan UNESCO pada konferensi tahunannya di Melbourne (Diptoadi, 1999:165).

Ironisnya, selama beberapa dekade yang lalu pendidikan di Indonesia pernah direkayasa menjadi alat politik yang kurang menghargai kemandirian. Perbedaan pendapat yang merupakan akar kemandirian kurang mendapat tempat pada masa itu. Kenyataan itu merupakan kerugian besar bagi masa depan bangsa. Keterpurukan Indonesia dewasa ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah masa lalu yang mengandalkan nasib bangsa pada kekuatan seseorang daripada pendapat orang banyak. Melalui paradigma baru pendidikan, masyarakat dicoba dibangkitkan menuju masyarakat madani, karena disadari bahwa tujuan pendidikan bukan hanya menjadikan manusia pintar tetapi juga berbudaya (*educated and civilized human being*) untuk masa kini dan masa depan.

Salah satu ciri berbudaya ialah kemampuan bekerjasama. Kerjasama menjadi penting artinya pada era global ini (Diptoadi, 2000). Pada era ini, sebagai bangsa kita tidak sendirian tetapi berada pada kesalingtergantungan dengan bangsa dan negara lain. Oleh karena itu, proses pembudayaan masyarakat Indonesia dilakukan dalam konteks masyarakat global, sehingga tidak teralienasi dari pergaulan masyarakat dunia.

Refigurisasi mengandung makna pembentukan kembali. Pendidikan perlu dibentuk atau dilahirkan kembali sebagai sistem yang relatif baru. *Refigurisasi* ini penting karena sistem lama gagal dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dari hasil identifikasi Ditjen Dikdasmen (2000:1) disimpulkan bahwa minimal ada tiga penyebab pendidikan tidak bermutu, yakni kesalahan dalam pendekatan, kesalahan dalam penyelenggaraan, dan kurangnya peran serta masyarakat.

Pada masa lampau, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan fungsi produksi pendidikan yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang jika semua masukan yang diperlukan telah dipenuhi maka dengan sendirinya lembaga itu akan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Pendekatan ini kurang memperhatikan proses, padahal proses pendidikan sangat menentukan kualitas keluaran pendidikan. Kesalahan kedua ialah dalam penyelenggaraan yang memposisikan sekolah sebagai pihak yang bergantung pada keputusan birokrasi. Posisi ini menjadikan sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan kreativitas, padahal

ketiga hal ini merupakan faktor pemicu bagi kemajuan sekolah. Kesalahan ketiga lebih terkait dengan sikap kurang proaktif sekolah dalam memberdayakan masyarakat. Dukungan masyarakat pada umumnya terbatas pada dukungan masukan, padahal proses merupakan faktor yang lebih menentukan pencapaian mutu pendidikan di sekolah.

Kenyataan tersebut di atas menyebabkan sekolah tidak lagi disebut sebagai pusat keunggulan. Akan tetapi jika lembaga pendidikan bersedia mereformasi sistem dan kurikulumnya serta peka dan akomodatif terhadap kebutuhan daerah, tidak mustahil lembaga pendidikan dapat merebut kembali predikat pusat keunggulan (*centers of excellence*) dalam pemberdayaan manusia. Melihat kecenderungan yang berkembang di daerah saat ini dan dengan mempertimbangkan kemungkinan terpenuhinya sekolah dengan berbagai faktor pendukung, tidak disangsikan lagi lembaga pendidikan di daerah memiliki prospek yang cerah.

TIM PENGEMBANG PENDIDIKAN BERBASIS DAERAH

Mewujudkan Pendidikan Berbasis Daerah (PBD) tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh tim. Anggota tim terdiri dari unsur perguruan tinggi di daerah, unsur pemerintah daerah, instansi terkait (Dinas Diknas Propinsi dan Dinas Diknas Kabupaten), unsur Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), unsur sekolah, dan perwakilan masyarakat lokal. Agar rumusan PBD memiliki akuntabilitas, masing-masing perwakilan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Perguruan tinggi pada umumnya memiliki banyak teori dan hasil kajian tentang potensi daerah serta memiliki kemandirian, atau menurut Tilaar (2000:108) sebagai pusat yang memiliki kemampuan dan kedudukan otonom. Oleh karena itu, perguruan tinggi di daerah diharapkan ikut membantu mengembangkan PBD sejak penyusunan visi-misi hingga implementasinya. Sebelum menyusun visi-misi pendidikan, perlu disimak apa yang dikatakan Miller dan Sellar (1985:330) bahwa siswa yang dididik sekarang akan menghadapi tantangan abad dua puluh satu, sehingga perlu diidentifikasi isu-isu pokok masa depan dan implikasi isu tersebut terhadap pendidikan.

Agar pengembangan PBD berjalan dengan aman, Pemerintah Daerah perlu memberi masukan kebijakan jangka panjang lengkap dengan hasil analisis *SWOT* untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

daerah di masa depan. Masukan ini diperlukan agar pengembang dapat melakukan perencanaan makro untuk jangka panjang sehingga tidak terjadi tambal sulam kebijakan di tengah perjalanan sampai PBD menunjukkan hasil seperti yang direncanakan. Meskipun demikian, pelaku pengembangan PBD juga harus cermat terhadap berbagai kebijakan yang diturunkan Pemerintah Daerah, karena sebagaimana diisyaratkan Fullan (1982) tidak jarang kebijakan penguasa di daerah berbenturan dengan nilai dan gagasan yang berkembang secara dinamis. Sementara di sisi lain, kemampuan mengakomodasikan dinamika pemikiran dan perubahan masyarakat merupakan jiwa dari PBD.

Pihak sekolah sebagai tempat penyemaian PBD diharapkan memberikan pandangan dari perspektif praktis, yakni kemungkinan munculnya berbagai fenomena ketika sampai pada tahap implementasi. Akan tetapi, sebelum sekolah memberikan masukan kepada pihak lain, guru di sekolah itu harus telah menyadari perlunya suatu perubahan, karena guru adalah sumber internal perubahan di sekolah (Miller & Seller, 1985:233). Jika tidak, pihak lain akan kurang yakin terhadap kesungguhan sekolah mengimplementasikan konsep-konsep baru, seperti PBD ini.

LPTK merupakan bagian dari universitas, tetapi dalam proses pengembangan dan implementasi PBD, LPTK dapat berdiri sendiri sejajar dengan universitas (fakultas-fakultas lain), karena misi utamanya ialah menghasilkan guru handal yang mampu membina lembaga pendidikan dalam skala lokal, regional, atau pun nasional. Sesuai dengan kompetensinya, LPTK bertugas menyusun rumusan operasional PBD, baik yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) mau pun petunjuk teknis (juknis). Agar tidak kehilangan relevansi dengan tujuan PBD, penyusunan juklak ataupun juknis perlu memperhatikan pendapat Tilaar (2000:13) bahwa jenis pendidikan dari taman kanak-kanak sampai universitas diarahkan kepada kebutuhan perkembangan sumber-sumber alam dan sumber manusia yang terdapat di daerah. Tujuannya ialah agar akuntabilitas PBD baik secara vertikal mau pun horizontal dapat dipertahankan.

Berbeda dari pihak universitas dan LPTK yang mengembangkan pekerjaannya lebih berdasarkan pendekatan keilmuan, Dinas Diknas lebih berkepentingan dengan masalah praktis-operasional, yakni mengkoordinasikan proses kerja perumusan, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi PBD. Dinas Diknas memiliki tanggung jawab memantau implementasi PBD sehingga ia harus memahami dengan jelas tugas pemantauan.

Menurut Milller dan Seller (1985:292), tugas pemantauan ialah untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan implementasi dan menggunakan informasi itu untuk memfasilitasi dan mendukung tugas-tugas guru.

Perwakilan masyarakat memberikan masukan kebutuhan krusial masyarakat, misalnya jenis-jenis keahlian yang diperlukan dalam mengeksplorasi hasil bumi bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Masyarakat sebagai bagian dari pelanggan-pengguna produk (*stakeholders*) diberi kesempatan ikut serta merencanakan PBD, karena mutu pendidikan ditentukan oleh kepuasan pelanggan (Ditjen Dikdasmen, 2000). Bahkan, kualitas proses dan produk PBD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas horizontal. Apapun bentuk dan jabaran tugas dari masing-masing pihak, yang terpenting ialah adanya koordinasi dan pertanggungjawaban silang antarpihak itu.

Pemda Propinsi dan Dinas Diknas Propinsi setelah melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Dinas Diknas Kabupaten mempertanggungjawabkannya ke Pemerintah Pusat sebagai akuntabilitas vertikal. Pada tingkat implementasi, sekolah harus bertanggung jawab kepada Pemda Kabupaten dan Dinas Diknas Kabupaten sebagai akuntabilitas horizontal. Di samping itu selama proses implementasi, sekolah dan masyarakat diharapkan terus melakukan hubungan konsultatif dengan universitas di daerah untuk meminta arahan agar konsep PBD berjalan pada alur yang benar. LPTK, universitas, Pemda Propinsi dan Dinas Propinsi serta Pemda Kabupaten dan Dinas Diknas Kabupaten juga terus melakukan koordinasi agar memiliki terjemahan yang sama terhadap keperluan masyarakat untuk diakomodasi dan dijabarkan dalam tindak pendidikan/pembelajaran di sekolah.

PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS DAERAH

Longstreet dan Shane (1993:359) menunjukkan dua faktor utama yang perlu dilakukan lebih dahulu sebelum mengembangkan kurikulum, yaitu membangun filsafat pendidikan, dan memperluas wawasan tentang masa depan. Oleh karena itu, tim pengembang kurikulum di daerah sebaiknya diambil dari kelompok ahli yang memiliki latar belakang filsafat pendidikan. Pada umumnya mereka memiliki pandangan jauh ke depan serta pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai yang sesuai bagi pengembangan pribadi anak didik di masa depan. Kelompok ini bekerjasama dengan kelompok ahli dari berbagai bidang keilmuan, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, ekologi, dan para praktisi kependidikan.

Filsafat pendidikan perlu dibangun sebelum merancang kurikulum, dalam pengertian bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan analisis secara logis untuk melihat berbagai kemungkinan tentang apa yang diharapkan dari pendidikan. Perlu digali premis-premis dasar tentang sifat manusia, masyarakat, anak manusia, sifat hakikat ilmu, kehidupan yang baik, sifat-hakikat belajar, serta cara paling efisien dalam memperoleh pengetahuan. Selain itu, kelompok pengembang kurikulum harus memiliki wawasan masa depan yang terkait dengan fenomena alam dan sosial yang sedang berlangsung. Agenda baru perlu disusun, dan isu baru perlu diinventarisasikan. Menurut Naisbit (1982), ada tiga isu penting menghadapi masa depan, yaitu globalisme versus regionalisme, desentralisasi versus sentralisasi, dan teknologi insani versus teknologi otonomi. Pertanyaan tentang tanda-tanda kecenderungan masa depan yang dapat dilihat sekarang dan pertanyaan tentang hasil memprakirakan masa depan yang bermakna bagi perencanaan pendidikan harus dapat dijawab dengan konsep, prinsip dan teori yang jelas.

Kejelasan dalam filsafat pendidikan dan wawasan masa depan yang luas juga akan membantu merumuskan kurikulum yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerah sekarang dan masa depan. Kejelasan itu juga akan memudahkan pekerjaan pengembang kurikulum, karena sebelum menyusun kurikulum ada empat pertanyaan pokok (Tyler, 1950), yaitu apa yang akan dicapai oleh pendidikan, pengalaman belajar apa yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan, bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan, dan bagaimana cara untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan, pertanyaan kedua berkaitan dengan struktur isi pelajaran, ketiga berkenaan dengan metode, dan keempat berkenaan dengan sistem evaluasi. Semua itu adalah prinsip-prinsip dasar dalam kurikulum dan pembelajaran.

Agar berada pada jalur yang benar, pekerjaan pengembangan kurikulum hendaknya dilakukan oleh kelompok yang memahami sifat-hakikat kurikulum dari hulu hingga ke muara. Pengembang kurikulum ini didampingi oleh kelompok ahli, baik ahli bidang studi maupun ahli dari disiplin-disiplin ilmu yang relevan dengan pengembangan daerah. Fungsi kelompok ahli ini ialah memfasilitasi pengembang kurikulum dalam menstruktur isi kurikulum sehingga *aplicable* untuk kehidupan sehari-hari. Jika mungkin, beberapa futurolog diikutsertakan dalam proses pengembangan kurikulum untuk memberi masukan berbagai masalah krusial di masa depan dan implikasinya terhadap PBD.

Payung kerja dapat dibangun bersama dengan arahan dari kelompok pengembang kurikulum, karena persoalan utama untuk menyiapkan manusia masa depan adalah persoalan kurikulum, yaitu pengalaman belajar apa yang perlu diberikan kepada siswa yang berguna bagi masa depannya (Tyler, 1950). Melalui payung kerja dapat diketahui secara tepat mekanisme kerja dan kelompok keahlian yang terlibat di dalamnya. Di dalam payung kerja, terdapat para pengambil keputusan, ahli kurikulum, ahli bidang studi, ahli dari berbagai disiplin ilmu, dan guru.

Pengambil keputusan ini terhimpun dalam satu kelompok pengarah (*steering committee*), yaitu para pejabat Pemda dan Dinas Diknas Propinsi dan Kabupaten. Mereka harus menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai kebijakan pengembangan SDM di daerah. Ahli kurikulum merupakan kelompok kerja yang secara intensif terlibat dalam proses perekayasaan kurikulum. Pada umumnya mereka mengambil peranan sebagai penanggung jawab pengembangan kurikulum. Kelompok pengembang kurikulum akan memberikan arahan kebijakan secara operasional, menentukan skema organisasi pengembangan, mengatur tugas-tugas para peserta, dan memeriksa kemajuan kegiatan pengembangan. Di samping itu, pengembang kurikulum harus sudah menyiapkan berbagai pedoman yang diperlukan untuk perumusan tujuan dan pemilihan isi pelajaran, metode pengajaran, alat bantu pengajaran, dan metode penilaian. Ahli bidang studi diperlukan dalam pemilihan konsep-konsep penting dari disiplin ilmu yang akan dijadikan isi pelajaran. Adapun ahli dari berbagai disiplin ilmu bertugas memberi masukan-masukan bagi materi-materi yang penting atau persoalan-persoalan lain yang diperlukan untuk mengantisipasi masa mendatang. Dalam kerja pengembangan ini kelompok guru diperlukan untuk memberi masukan dari dimensi praktis.

PENUTUP

UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan implikasi yang cukup luas terhadap bidang pendidikan di daerah. Lembaga-lembaga pendidikan di daerah harus menyiapkan diri untuk menyambut berbagai harapan sekaligus tantangan bagi pembangunan SDM yang lebih bermutu. Tantangan pertama yang harus dijawab ialah perlu dikembangkannya Pendidikan Berbasis Daerah (PBD) lengkap dengan kurikulum dan perangkat pelaksanaannya. Keberhasilan PBD ini sejak tahap pengembangan dan im-

plementasinya ditentukan oleh kekompakan dan profesionalitas semua pihak. Di satu sisi PBD ini menjanjikan masa depan yang lebih baik, tetapi di sisi lain adalah tantangan bagi daerah. Kemampuan Pemda mengakomodasi dan merealisasi konsep PBD yang didukung oleh sejumlah kelompok keahlian dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan SDM di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Diptoadi, V.L. 1999. Reformasi Pendidikan di Indonesia Menghadapi Tantangan Abad 21. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6 (3): 161-175.
- Ditjen Dikdasmen Depdiknas. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Fullan, M. 1982. *The Meaning of Educational Change*. Toronto: Ontario Institute.
- Longstreet, W.S. & Shane, H.G. 1993. *Curriculum for a New Millenium*. Boston: Allyn and Bacon.
- Mantja, W. 2000. Manajemen Pendidikan dalam Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7 (2): 87-96.
- Miller, J. & Seller, G.A. 1985. *Curriculum: Perspective and Practice*. New York: Longman.
- Naisbit, J. 1982. *Megatrends*. New York: Warner Books.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tyler, R.W. 1950. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wijandi, S. & Hidayanto, D.N. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Data Manajemen, LPPK Fokus Banjarmasin, 2 & 4 Desember 2000.